



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi...

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PP.02.3-BA/33/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Tahun ...

Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Sn W. Lariningsih

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

dalam ...

- dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
  3. Agar Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, yang terdiri dari

1. Hari, Tanggal dan Waktu;
2. Jenis Formulir;
3. Pemilih;
4. Pemungutan Suara;
5. Penghitungan Suara;
6. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang;
7. Pemungutan Suara Lanjutan atau Susulan.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, selanjutnya disebut Pilgub Jateng, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018 – 2023.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu/Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tahun...

Tahun 2018 yang dilaksanakan secara bersamaan, selanjutnya disebut Pemilihan Serentak.

4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Provinsi untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pilgub Jateng.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang

diberikan ...

- diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng di kabupaten/kota.
  14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng di kecamatan.
  15. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng di desa/kelurahan.
  16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
  17. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  18. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng.
  19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pilgub Jateng.

20. Pemantau ...

20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pilgub Jateng.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pilgub Jateng;
22. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Paslon.
23. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Paslon, Surat suara yang dinyatakan tidak sah, Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
24. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Paslon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
25. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilgub Jateng yang memuat foto, nama, dan nomor Paslon.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
28. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Hari adalah hari kalender.
30. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pilgub Jateng.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

E. ASAS ...

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan berdasarkan asas :

1. langsung;
2. umum;
3. bebas;
4. rahasia;
5. jujur;
6. adil;
7. efektif;
8. efisien;
9. mandiri;
10. kepastian hukum;
11. tertib;
12. kepentingan umum;
13. keterbukaan;
14. proporsionalitas;
15. profesionalitas;
16. akuntabilitas; dan
17. aksesibilitas;

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA

A. PELAKSANAAN

1. Hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS ditetapkan secara serentak oleh KPU Provinsi yaitu hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018.
2. Hari Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
3. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
4. KPU Provinsi menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Provinsi.
5. Keputusan KPU Provinsi disampaikan kepada Gubernur untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.

6. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
7. Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

B. FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir :
  - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
  - c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil penghitungan perolehan suara sah;
  - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
  - e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
  - g. Model C4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
  - h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
  - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
  - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
  - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
  - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
  - m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih;
  - n. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih tambahan, untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan

suara ...

suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

- o. Formulir Catatan Ketidakhadiran Pemilih di TPS.
2. Formulir pemungutan dan penghitungan suara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

### BAB III PEMILIH

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
  - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
  - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK);
  - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model A.Tb-KWK.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
3. Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih menyerahkan formulir Model C6- KWK.
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Keadaan tertentu meliputi :
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - d. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/rehabilitasi;
  - e. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - f. tugas belajar;

g. pindah ...

- g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
6. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 pada DPT.
  9. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
  10. Pemilih diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
  11. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud angka 6, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
  12. KPU Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
  13. Pemilih dari TPS lain dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
  14. Pemilih dari TPS lain diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.

15. Pemilih...

15. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
  - b. Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.
16. Hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
17. Penggunaan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
18. Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
19. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
20. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan :
  - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan;
  - b. Memudahkan Pemilih;
  - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
  - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
21. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS, dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

#### BAB IV

#### PEMUNGUTAN SUARA

##### A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara
  - a. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

b. Pengumuman ...

- b. Pengumuman hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara di TPS dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- c. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- d. Dalam formulir Model C6-KWK, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS dan larangan penerimaan politik uang.
- e. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK.
- f. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- g. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- h. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- i. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK dalam DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- j. Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
- k. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- l. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK pada DPT,

dan ...

dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

- m. Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
  - n. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.
  - o. PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS dengan menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.
  - p. Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.
  - q. Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
  - r. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.
  - s. PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota.
  - t. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan formulir Model DB8-KWK.
  - u. Dalam pelaksanaan Pilgub Jateng, KPU Kabupaten/Kota menyerahkan hasil rekapitulasi di TPS kepada KPU Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model DC7-KWK.
2. Penyiapan TPS
- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
  - b. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
  - c. Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

d. Dalam ...

- d. Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- e. TPS dibuat dengan ukuran paling kurang/panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- f. TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- g. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- h. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
  - 1) Apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
  - 2) Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- i. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- j. TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
  - 1) Ruang atau tenda;
  - 2) Alat pembatas;
  - 3) Papan pengumuman untuk menempel daftar Paslon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Paslon, salinan DPT;
  - 4) Papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
  - 5) Tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
  - 6) Meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
  - 7) Tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pilgub Jateng; dan
  - 8) Alat penerangan yang cukup.
- k. TPS...

- k. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, jalan, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- l. Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud huruf k, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas fasilitas tersebut.
- m. TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- n. TPS harus bebas dari atribut Paslon atau Partai Politik dalam radius 200 meter.
- o. KPPS menyiapkan dan mengatur :
  - 1) Tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - 2) Meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
  - 3) Meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS kelima, di dekat pintu masuk TPS;
  - 4) Tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
  - 5) Tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
  - 6) Tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pilgub Jateng ditempatkan di luar TPS;
  - 7) Meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
  - 8) Meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
  - 9) Bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;

- 10) Meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai bilik suara dengan leluasa;
  - 11) Papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang :
    - a) Daftar Paslon, visi, misi, program dan biodata singkat Paslon; dan
    - b) Salinan DPT.
  - 12) Papan sebagaimana dimaksud pada angka 11 pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano;
  - 13) Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
  - 14) Tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- p. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  - b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri atas :
    - 1) Kotak suara;
    - 2) Surat suara;
    - 3) Tinta;
    - 4) Bilik pemungutan suara;
    - 5) Segel;
    - 6) Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
    - 7) TPS.
  - c. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas:
    - 1) Sampul kertas;
    - 2) Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
    - 3) Karet pengikat Surat Suara;
    - 4) Lem/perekat;
    - 5) Kantong plastik;
    - 6) *Ballpoint*;

7) Gembok...

- 7) Gembok;
  - 8) Spidol;
  - 9) Formulir dan sertifikat;
  - 10) Stiker nomor kotak suara;
  - 11) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - 12) Alat bantu tuna netra;
  - 13) Daftar Paslon, visi, misi, dan biodata Paslon; dan
  - 14) Salinan DPT.
- d. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- e. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dimasukkan dalam kotak suara, terdiri atas :
- 1) Surat suara;
  - 2) Tinta;
  - 3) Segel;
  - 4) Alat untuk member tanda pilihan;
  - 5) Sampul kertas;
  - 6) Karet pengikat surat suara;
  - 7) Kantong plastik;
  - 8) Formulir dan sertifikat;
  - 9) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
  - 10) Alat bantu tuna netra.
- f. Formulir dan Sertifikat dimasukkan ke dalam kotak suara, dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.
- g. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas :
- 1) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
  - 2) Tinta paling banyak 2 (dua) botol;
  - 3) Sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
  - 4) Segel sebanyak 19 (sembil belas) buah;
  - 5) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap TPS;

- 6) Bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
  - 7) Alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
- h. Dalam hal penghitungan Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
- i. Sampul kertas, terdiri atas:
- 1) Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
  - 2) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- j. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdiri dari :
- 1) Sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
  - 2) Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat :
    - a) Surat Suara sah;
    - b) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
    - c) Surat Suara yang tidak sah;
    - d) Surat Suara yang tidak digunakan;
    - e) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
    - f) Salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb-KWK;
    - g) Kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- k. Penggunaan sampul kertas ditentukan sebagai berikut:
- 1) sampul kertas sebagaimana dimaksud huruf I angka 1), yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;

2) sampul...

- 2) sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- l. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud huruf k angka 2) yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud huruf j angka 2) huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf g) disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
- m. Segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah yang digunakan untuk menyegel :
  - 1) Masing-masing sampul yang memuat:
    - a) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram;
    - b) Salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
    - c) Surat Suara sah;
    - d) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru coblos;
    - e) Surat Suara yang tidak sah;
    - f) Surat Suara yang tidak digunakan; dan
    - g) Tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
  - 2) Lubang kotak suara; dan
  - 3) Gembok kotak suara.
- n. Jumlah segel sebagaimana dimaksud huruf m ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
- o. Dukungan perlengkapan lainnya disediakan dengan ketentuan :
  - 1) Tanda pengenal digunakan untuk:
    - a) KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
    - b) Saksi sebanyak diperlukan; dan
    - c) Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
  - 2) Karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;
  - 3) Lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
  - 4) Kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
  - 5) Ballpoint sebanyak 5 (lima) buah;

6) Gembok...

- 6) Gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
  - 7) Spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan untuk mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan paling banyak 4 (empat) buah.
  - 8) Tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.
- p. Dukungan perlengkapan lainnya berupa daftar Paslon, visi, misi dan biodata Paslon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- q. Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT tiap-tiap TPS digunakan untuk :
- 1) Ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - 2) Bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - 3) Disampaikan kepada Saksi yang hadir sebanyak yang diperlukan; dan
  - 4) Disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Pembagian Tugas KPPS
- a. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
    - 1) Tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
    - 2) Pembagian tugas Anggota KPPS.
  - b. Penjelasan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
  - c. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut:
    - 1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
    - 2) Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan

berita...

berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

- 3) Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
  - a) Memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb atau DPPh;
  - b) Meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih;
  - c) Dalam hal terdapat keraguan terhadap formulir Model C6-KWK yang diserahkan oleh Pemilih, anggota KPPS keempat atau anggota KPPS kelima meminta Pemilih dimaksud menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - d) Anggota KPPS keempat atau anggota KPPS kelima meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b) dalam Daftar Pemilih;
  - e) Memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
  - f) Menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
  - g) Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
  - h) Mencatat identitas Pemilih tambahan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.

i) Memeriksa...

- i) Memeriksa dan memastikan nama Pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT;
  - j) Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh; dan
  - k) Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana huruf j), petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.
- 4) Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara, bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
- 5) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- d. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
- e. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
- f. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
- h. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS kepada PPK.
- i. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- j. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

k. KPU...

- k. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati/Walikota kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

## B. KEGIATAN PELAKSANAAN

### 1. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. Memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. Memasang salinan DPT dan daftar Paslon pada papan pengumuman;
- c. Menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
- d. Mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. Menerima surat mandat dari Saksi; dan
- f. Memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

### 2. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

- a. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- b. Rapat Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB.
- c. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Paslon dan simbol/gambar Partai Politik dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Paslon/Tim Kampanye.
- d. Jumlah saksi per TPS paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Paslon.
- e. Saksi yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- f. Apabila pada pukul 07.00 WIB, Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- g. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf f Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.

h. Saksi...

- h. Saksi yang hadir berhak menerima:
  - 1) Salinan DPT; dan
  - 2) Salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara.
- i. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
  - 1) Pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - 2) Pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
  - 3) Penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- j. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS :
  - 1) Memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
  - 2) Membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi :
    - a) Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
    - b) Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
    - c) Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
    - d) Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
  - 3) Memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
    - a) Jumlah Surat Suara yang diterima;
    - b) Tata ...

- b) Tata cara pemberian suara;
  - c) Tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pilgub Jateng atau warga masyarakat/Pemilih;
  - d) Tata cara pemantauan oleh Pemantau Pilgub Jateng.
- 4) Memberikan penjelasan tata cara pemberian suara secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- k. Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- l. Kegiatan Ketua KPPS dalam memimpin rapat pemungutan suara dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan Petugas ketertiban TPS serta disaksikan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pilgub Jateng, warga masyarakat dan/atau Pemilih.
- m. Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS, berbunyi sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
- n. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara meliputi:
- 1) Format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Paslon;
  - 2) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
  - 3) Tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
  - 4) Dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;

5) Pemberian ...

- 5) Pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;
  - 6) Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb;
  - 7) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
  - 8) Kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
  - 9) Larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- o. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - 2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
  - 3) Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
  - 4) Pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomorurut, pas foto, dan nama Paslon.
- p. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap:
- 1) KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
  - 2) Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
- q. Apabila Paslon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Paslon memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.
- r. Dalam hal salah satu dari Paslon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari Pemungutan Suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau

Paslon...

Paslon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu Calon dari Paslon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai Paslon Pilgub Jateng :

- 1) KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
- 2) Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

3. Pemberian Suara

- a. Setelah memberikan penjelasan kepada pemilih, Ketua KPPS :
  - 1) Menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
  - 2) Memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
  - 3) Memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
  - 4) Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- b. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- c. Dalam hal Pemilihan Bersama di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh yang masih dalam wilayah Kabupaten/Kota, diberi 2 (dua) Surat Suara untuk Pilgub Jateng dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pilgub Jateng.
- e. Setelah menerima Surat Suara, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- f. Apabila...

- f. Apabila pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.
- g. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara Pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- h. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
- i. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih tambahan, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- j. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- k. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih tambahan, apabila Surat Suara masih tersedia.
- l. Dalam hal Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
- m. Pemilih yang telah menerima Surat Suara, melakukan kegiatan:
  - 1) Menuju bilik suara;
  - 2) Membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
  - 3) Mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
  - 4) Melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
  - 5) Memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Surat Suara;
  - 6) Mencilupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
- n. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

o. Ketentuan...

- o. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf m berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- p. Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.
- q. Pendamping dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- r. Pemilih tunanetra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- s. Pemberian bantuan terhadap Pemilih disabilitas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
  - 2) Bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
- t. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
- u. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- v. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

## BAB V

### PENGHITUNGAN SUARA

#### A. KEGIATAN PERSIAPAN

- 1. Penyiapan Sarana dan Prasarana
  - a. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 WIB setelah waktu Pemungutan Suara selesai.

b. Dalam...

- b. Dalam hal Pemilihan Bersama, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pilgub Jateng.
  - c. Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
  - d. Sarana dan prasarana penghitungan suara, meliputi:
    - 1) Pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
    - 2) Tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pilgub Jateng, dan masyarakat;
    - 3) Alat keperluan administrasi;
    - 4) Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
    - 5) Sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
    - 6) Segel;
    - 7) Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
    - 8) Peralatan TPS lainnya.
  - e. Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pilgub Jateng, dan masyarakat diatur sebagai berikut:
    - 1) Saksi dan PPL/Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
    - 2) Pemilih, Pemantau Pilgub Jateng dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
  - f. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
2. Pencatatan Surat Suara
- a. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
    - 1) Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
    - 2) Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
    - 3) Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;
    - 4) Jumlah ...

- 4) Jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
  - 5) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
  - 6) Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
  - 7) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
  - 8) Jumlah Surat Suara yang digunakan.
- b. Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
  - c. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.
3. Pembagian Tugas
- a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
    - 1) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
      - a) Memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
      - b) Membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
    - 2) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
    - 3) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
    - 4) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Paslon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
    - 5) Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.

b. Apabila...

- b. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

## B. PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan.
2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
  - a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - b. Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
  - c. Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
  - d. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih;
  - e. Mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.
4. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
5. Ketua KPPS bertugas :
  - a. Memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
  - b. Mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

7. Saksi ...

7. Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pilgub Jateng yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
8. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.
9. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
  - a. Memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
  - b. Memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
  - c. Menghitung perolehan suara sah masing-masing Paslon;
  - d. Menjumlahkan seluruh suara sah;
  - e. Menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - f. Menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
10. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi.
11. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10, Ketua KPPS melakukan pembetulan.
12. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
13. Pada angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.
16. Surat Suara dinyatakan sah, jika:
  - a. Ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
  - b. Diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) Paslon dalam Surat Suara.
17. Tanda coblos diatur sebagai berikut:

a. Tanda ...

- a. Tanda coblos pada 1 (satu) kolom Paslon yang memuat nomor urut atau nama Paslon atau foto Paslon, dinyatakan sah untuk Paslon yang bersangkutan;
  - b. Tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Paslon yang memuat nomor urut, nama Paslon dan foto Paslon, dinyatakan sah untuk Paslon yang bersangkutan; atau
  - c. Tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Paslon yang memuat nomor urut, nama Paslon dan foto Paslon, dinyatakan sah untuk Paslon yang bersangkutan.
18. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun/menghitung dan memisahkan:
    - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Paslon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
    - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
  19. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
  20. Sampul yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
  21. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
  22. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud angka 19 dan angka 21, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
  23. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
  24. Penandatanganan formulir, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

### C. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK dengan Model C1-KWK Plano berhologram.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
11. Keberatan yang diajukan oleh Paslon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

### D. PENGUMUMAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.

2. KPPS ...

2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan pada hari Pemungutan Suara.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan/atau PPK pada hari pemungutan suara untuk dipindai (*scan*);
4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan yang bersangkutan.
6. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. KPU Kabupaten/Kota memindai (*scan*) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi :
  - a. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
  - b. Salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
  - c. Formulir Model C2-KWK;
  - d. Formulir Model C3-KWK;
  - e. Formulir ...

- e. Formulir Model C5-KWK;
  - f. Formulir Model C6-KWK;
  - g. Formulir Model C7-KWK; dan
  - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
11. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
  12. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU.
  13. Pengiriman hasil pemindaian formulir dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU.
  14. Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi, KPU Provinsi dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flashdisk*.
  15. KPU Provinsi dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan berpedoman pada hasil kajian KPU.
  16. KPPS dilarang memberikan salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun kecuali kepada pihak yang telah ditentukan.

## BAB VI

### PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

#### A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. Petugas...

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
  - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
  4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPU Kabupaten/Kota.
  5. KPU Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.
  6. Hasil rapat pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
  8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
  9. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Paslon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
  10. Pemungutan Suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
  11. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS.
  12. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.
  13. Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.

14. Pemilih...

14. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
15. Keadaan tertentu, meliputi:
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. Tugas belajar;
  - e. Pindah domisili; dan
  - f. Tertimpa bencana alam.
16. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 14, meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
17. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi.
18. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi.
19. Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
20. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara untuk pemungutan suara pulang kepada KPU Provinsi.
21. KPU Provinsi mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara.
22. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
23. Sampul harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
24. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

B. PENGHITUNGAN ...

## B. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan Suara ulang meliputi:
  - a. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS;
  - b. Penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
2. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
  - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi Paslon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
  - g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud angka 2, Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS, Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

## C. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
  - a. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi :
    - 1) Menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan

- 2) Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
- b. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a angka 1), paling kurang menetapkan jadwal:
- 1) Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
  - 2) Penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
  - 3) Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - 4) Pelaksanaan hari Pemungutan Suara Ulang;
  - 5) Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; dan
  - 6) Penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
- c. Dalam hal KPU Provinsi melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Provinsi menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf b, kepada:
- 1) KPU;
  - 2) Mahkamah Konstitusi;
  - 3) Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - 4) Panwas Kabupaten/Kota.
- d. KPU Provinsi dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS.
- e. Pemungutan Suara ulang di TPS, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan

pendidikan ...

pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.

- g. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Paslon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - h. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS.
  - i. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
  - j. Formulir Model C-KWK, Model-C1 KWK dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan dalam sampul, disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
  - k. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditempel label dengan tulisan “Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.
2. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
- a. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi :
    - 1) Menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
    - 2) Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
  - b. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), paling kurang menetapkan jadwal :
    - 1) Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

2) Pengangkatan ...

- 2) Pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) Pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - 4) Pelaksanaan hari Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - 5) Penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
- c. Dalam hal KPU Provinsi melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, KPU Provinsi menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf b, kepada:
- 1) KPU;
  - 2) Mahkamah Konstitusi;
  - 3) Bawaslu Provinsi; dan
  - 4) Panwas Kabupaten/Kota;
- d. KPU Provinsi menyampaikan Keputusan kepada KPU, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di TPS.
- e. KPU Provinsi mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten/Kota.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Paslon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten/Kota.
- g. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

## BAB VII

### PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pilgub Jateng terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pilgub Jateng terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh :
  - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/kelurahan;
  - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
  - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
7. Pemungutan Suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.

8. Dalam ...

8. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul KPU Provinsi.
9. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU Provinsi menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pilgub Jateng.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau Puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
  - b. KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS terdekat yang akan melayani pemilih dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;

c. KPU ...

- c. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
4. Bagi TPS terdekat yang ditunjuk, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas, dengan ketentuan :
  - a. Pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
  - b. Petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model A.5-KWK dari pemilih;
  - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
  - d. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
6. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.
7. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra berupa template Surat Suara, yang disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
8. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak dan untuk pemilih tambahan.

9. Dalam ...

9. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
10. Penggunaan Surat Suara cadangan dicatat dalam berita acara.
11. Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilgub Jateng dengan 1 (satu) Paslon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan dengan Satu Paslon.
12. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilgub Jateng 1 (satu) Paslon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1(satu) kolom yang memuat foto dan nama Paslon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
13. Desain surat suara Pilgub Jateng 1 (satu) Paslon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Latar belakang foto pada kolom Paslon berwarna merah putih;
  - b. Foto Paslon dibuat berpasangan;
  - c. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Paslon;
  - d. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Kolom kosong yang tidak bergambar.
14. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara Pilgub Jateng 1 (satu) Paslon ditetapkan dengan Keputusan KPU.
15. Pemberian suara Pilgub Jateng 1 (satu) Paslon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada :
  - a. Kolom yang memuat foto dan nama Paslon; atau
  - b. Kolom kosong yang tidak bergambar.
16. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 15 diatur sebagai berikut :
  - a. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Paslon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Paslon; atau
  - b. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Paslon yang bersangkutan.
17. Surat Suara untuk Pilgub Jateng 1 (satu) Paslon dinyatakan sah, apabila:
  - a. Ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b. Diberi ...

- b. Diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Paslon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

1. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018.
2. Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pemungutan dan penghitungan suara Pilgub Jateng.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 27 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Surabaya, 27 September 2017  
Sri Lili Lariningsih

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2018

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

1. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
3. LAMPIRAN MODEL C1-KWK : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
4. MODEL C1-KWK PLANO : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
5. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
6. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

7. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
9. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
11. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
12. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
13. LAMPIRAN MODEL : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di C1-KWK SATU PASLON Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
14. MODEL C1-KWK : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PLANO SATU PASLON Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
15. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
16. MODEL C3-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih. SATU PASLON

17. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara SATU PASLON Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
18. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
19. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada SATU PASLON Pemilih.
20. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir di Tempat Pemungutan Suara SATU PASLON Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.



**BERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**  
**DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota\*) : ..... Provinsi : Jawa Tengah

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

**B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPPh, dan DPTb.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI CALON**

1.	2.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....

\*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

**MODEL  
C1-KWK**

**LOGO HOLOGRAM**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
A.	DATA PEMILIH									
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)									
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan									
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)									
B.	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)									
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan									
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)									

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4	Jumlah surat suara yang digunakan			

**III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

**IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih									

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI CALON**

1.	2.
Nama lengkap :.....	Nama lengkap :.....

[jdih.kpu.go.id/jateng](http://jdih.kpu.go.id/jateng)

\*) Coret yang tidak perlu



**RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**  
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

LAMPIRAN  
MODEL C1-KWK

LOGO HOLOGRAM

TPS : Nomor..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
1				
2				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI CALON**

1.	2.
Nama lengkap : .....	Nama lengkap : .....

\*) Coret yang tidak perlu



LOGO HOLOGRAM

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

MODEL C1-KWK  
PLANO

TPS : Nomor.....  
Kecamatan : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....

NAMA PASANGAN CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1. NAMA PASANGAN CALON																	(ditulis dengan huruf)
2. NAMA PASANGAN CALON																	(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1 +2)																	(ditulis dengan huruf)
SUARA TIDAK SAH																	(ditulis dengan huruf)

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah Seluruh Suara Sah				(ditulis dengan huruf)
2	Jumlah Suara Tidak Sah				(ditulis dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah				(ditulis dengan huruf)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1. ....
2	Anggota		2. ....
3	Anggota		3. ....
4	Anggota		4. ....
5	Anggota		5. ....
6	Anggota		6. ....
7	Anggota		7. ....

SAKSI PASANGAN CALON

Nama Lengkap	Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur	Tanda Tangan
	Nama Pasangan Calon	.....
	Nama Pasangan Calon	.....





**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....  
Alamat : .....

Atas permintaan pemilih

Nama : .....  
Nomor Urut DPT/DPPH/DPTb \*) : ..... TPS : Nomor .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., .....

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok Penyelenggara**  
**Pemungutan Suara**

**Yang Membuat Pernyataan**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.



**MODEL  
C4-KWK**

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal :** Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di TPS.

**Kepada**  
**Yth. Ketua PPS** .....  
**di -**  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor ..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

.....

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

**Keterangan :**

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



**MODEL  
C5-KWK**

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN  
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

TPS : Nomor .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

No	Nama	Saksi Pasangan Calon / PPL	Tanda tangan
1	.....	Nama Pasangan Calon	.....
2	.....	Nama Pasangan Calon	.....
3	.....	PPL/Pengawas TPS	.....

..... , .....

Yang Menyerahkan  
Ketua KPPS

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : RABU/ 27 JUNI 2018  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

....., .....

**Tata cara pemberian suara :**  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....
		No. DPT	: .....
		Diterima Tgl.	: .....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : RABU/ 27 JUNI 2018  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

....., .....

**Tata cara pemberian suara :**  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....
		No. DPT	: .....
		Diterima Tgl.	: .....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : RABU/ 27 JUNI 2018  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

.....

**Tata cara pemberian suara :**  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....
		No. DPT	: .....
		Diterima Tgl.	: .....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL  
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : RABU/ 27 JUNI 2018  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

.....

**Tata cara pemberian suara :**  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....
		No. DPT	: .....
		Diterima Tgl.	: .....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

Nomor TPS : .....  
Kelurahan/Desa\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
JML						

\*) coret salah satu

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						

68.						
JML						

**MODEL C7-KWK**  
**Halaman 3**

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
78.						
79.						
80.						
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						
101.						
102.						
103.						
104.						
105.						

106.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
107.						
108.						
109.						
110.						
111.						
112.						
113.						
114.						
115.						
116.						
117.						
118.						
119.						
120.						
121.						
122.						
123.						
124.						
125.						
126.						
127.						
128.						
129.						
130.						
131.						
132.						
133.						
134.						
135.						
136.						
137.						
138.						
139.						
140.						
141.						
142.						
143.						

144.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
145.						
146.						
147.						
148.						
149.						
150.						
151.						
152.						
153.						
154.						
155.						
156.						
157.						
158.						
159.						
160.						
161.						
162.						
163.						
164.						
165.						
166.						
167.						
168.						
169.						
170.						
171.						
172.						
173.						
174.						
175.						
176.						
177.						
178.						
179.						
180.						
181.						

182.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
183.						
184.						
185.						
186.						
187.						
188.						
189.						
190.						
191.						
192.						
193.						
194.						
195.						
196.						
197.						
198.						
199.						
200.						
201.						
202.						
203.						
204.						
205.						
206.						
207.						
208.						
209.						
210.						
211.						
212.						
213.						
214.						
215.						
216.						
217.						
218.						
219.						

220.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
221.						
222.						
223.						
224.						
225.						
226.						
227.						
228.						
229.						
230.						
231.						
232.						
233.						
234.						
235.						
236.						
237.						
238.						
239.						
240.						
241.						
242.						
243.						
244.						
245.						
246.						
247.						
248.						
249.						
250.						
251.						
252.						
253.						
254.						
255.						
256.						
257.						

258.						
JML						

**MODEL C7-KWK**  
**Halaman 8**

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
259.						
260.						
261.						
262.						
263.						
264.						
265.						
266.						
267.						
268.						
269.						
270.						
271.						
272.						
273.						
274.						
275.						
276.						
277.						
278.						
279.						
280.						
281.						
282.						
283.						
284.						
285.						
286.						
287.						
288.						
289.						
290.						
291.						
292.						
293.						
294.						
295.						

296.						
JML						

**MODEL C7-KWK**  
**Halaman 9**

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
297.						
298.						
299.						
300.						
301.						
302.						
303.						
304.						
305.						
306.						
307.						
308.						
309.						
310.						
311.						
312.						
313.						
314.						
315.						
316.						
317.						
318.						
319.						
320.						
321.						
322.						
323.						
324.						
325.						
326.						
327.						
328.						
329.						
330.						
331.						
332.						
333.						

334.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
335.						
336.						
337.						
338.						
339.						
340.						
341.						
342.						
343.						
344.						
345.						
346.						
347.						
348.						
349.						
350.						
351.						
352.						
353.						
354.						
355.						
356.						
357.						
358.						
359.						
360.						
361.						
362.						
363.						
364.						
365.						
366.						
367.						
368.						
369.						
370.						
371.						

372.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
373.						
374.						
375.						
376.						
377.						
378.						
379.						
380.						
381.						
382.						
383.						
384.						
385.						
386.						
387.						
388.						
389.						
390.						
391.						
392.						
393.						
394.						
395.						
396.						
397.						
398.						
399.						
400.						
401.						
402.						
403.						
404.						
405.						
406.						
407.						
408.						
409.						

410.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
411.						
412.						
413.						
414.						
415.						
416.						
417.						
418.						
419.						
420.						
421.						
422.						
423.						
424.						
425.						
426.						
427.						
428.						
429.						
430.						
431.						
432.						
433.						
434.						
435.						
436.						
437.						
438.						
439.						
440.						
441.						
442.						
443.						
444.						
445.						
446.						
447.						

448.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
449.						
450.						
451.						
452.						
453.						
454.						
455.						
456.						
457.						
458.						
459.						
460.						
461.						
462.						
463.						
464.						
465.						
466.						
467.						
468.						
469.						
470.						
471.						
472.						
473.						
474.						
475.						
476.						
477.						
478.						
479.						
480.						
481.						
482.						
483.						
484.						
485.						

486.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
487.						
488.						
489.						
490.						
491.						
492.						
493.						
494.						
495.						
496.						
497.						
498.						
499.						
500.						
501.						
502.						
503.						
504.						
505.						
506.						
507.						
508.						
509.						
510.						
511.						
512.						
513.						
514.						
515.						
516.						
517.						
518.						
519.						
520.						
521.						
522.						
523.						

524.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
525.						
526.						
527.						
528.						
529.						
530.						
531.						
532.						
533.						
534.						
535.						
536.						
537.						
538.						
539.						
540.						
541.						
542.						
543.						
544.						
545.						
546.						
547.						
548.						
549.						
550.						
551.						
552.						
553.						
554.						
555.						
556.						
557.						
558.						
559.						
560.						
561.						

562.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
563.						
564.						
565.						
566.						
567.						
568.						
569.						
570.						
571.						
572.						
573.						
574.						
575.						
576.						
577.						
578.						
579.						
580.						
581.						
582.						
583.						
584.						
585.						
586.						
587.						
588.						
589.						
590.						
591.						
592.						
593.						
594.						
595.						
596.						
597.						
598.						
599.						

600.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
601.						
602.						
603.						
604.						
605.						
606.						
607.						
608.						
609.						
610.						
611.						
612.						
613.						
614.						
615.						
616.						
617.						
618.						
619.						
620.						
621.						
622.						
623.						
624.						
625.						
626.						
627.						
628.						
629.						
630.						
631.						
632.						
633.						
634.						
635.						
636.						
637.						

638.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
639.						
640.						
641.						
642.						
643.						
644.						
645.						
646.						
647.						
648.						
649.						
650.						
651.						
652.						
653.						
654.						
655.						
656.						
657.						
658.						
659.						
660.						
661.						
662.						
663.						
664.						
665.						
666.						
667.						
668.						
669.						
670.						
671.						
672.						
673.						
674.						
675.						

676.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
677.						
678.						
679.						
680.						
681.						
682.						
683.						
684.						
685.						
686.						
687.						
688.						
689.						
690.						
691.						
692.						
693.						
694.						
695.						
696.						
697.						
698.						
699.						
700.						
701.						
702.						
703.						
704.						
705.						
706.						
707.						
708.						
709.						
710.						
711.						
712.						
713.						

714.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
715.						
716.						
717.						
718.						
719.						
720.						
721.						
722.						
723.						
724.						
725.						
726.						
727.						
728.						
729.						
730.						
731.						
732.						
733.						
734.						
735.						
736.						
737.						
738.						
739.						
740.						
741.						
742.						
743.						
744.						
745.						
746.						
747.						
748.						
749.						
750.						
751.						

752.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
753.						
754.						
755.						
756.						
757.						
758.						
759.						
760.						
761.						
762.						
763.						
764.						
765.						
766.						
767.						
768.						
769.						
770.						
771.						
772.						
773.						
774.						
775.						
776.						
777.						
778.						
779.						
780.						
781.						
782.						
783.						
784.						
785.						
786.						
787.						
788.						
789.						

790.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
791.						
792.						
793.						
794.						
795.						
796.						
797.						
798.						
799.						
800.						
JML						

TandaTangan  
Ketua KPPS

( ..... )



**BERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**  
**DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**MODEL C, KWK  
SATU PASLON  
SUARA DALAM**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota\*) : ..... Provinsi : Jawa Tengah

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

**B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPPh, dan DPTb.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI CALON**

1.	2.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....

\*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

**MODEL C1-KWK  
SATU PASLON**

**LOGO HOLOGRAM**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
A.	DATA PEMILIH									
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)									
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan									
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)									
B.	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)									
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)									
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan									
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)									

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4	Jumlah surat suara yang digunakan			

**III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

**IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih									

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI**

Nama	Tanda Tangan





**RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**  
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

LAMPIRAN  
MODEL C1-KWK SATU  
PASLON

LOGO HOLOGRAM

TPS : Nomor..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

<b>NAMA CALON</b>	<b>SUARA SAH</b>		
<b>NAMA PASANGAN CALON</b>			
<b>KOLOM KOSONG</b>			
<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>			

<b>JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH</b>			
---------------------------------------	--	--	--

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI**

<u>Nama</u>	Tanda Tangan



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

**MODEL C1-KWK PLANO  
SATU PASLON**

LOGO HOLOGRAM

TPS : Nomor.....  
Kecamatan : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....

NAMA PASANGAN CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
NAMA PASANGAN CALON																			(ditulis dengan huruf)
NAMA PASANGAN CALON																			(ditulis dengan huruf)
KOLOM KOSONG																			(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																			(ditulis dengan huruf)

SUARA TIDAK SAH																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
SUARA TIDAK SAH																			(ditulis dengan huruf)

**DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

1	Jumlah Seluruh Suara Sah					(ditulis dengan huruf)
2	Jumlah Suara Tidak Sah					(ditulis dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah					(ditulis dengan huruf)

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1. ....
2	Anggota		2. ....
3	Anggota		3. ....
4	Anggota		4. ....
5	Anggota		5. ....
6	Anggota		6. ....
7	Anggota		7. ....

**SAKSI**

Nama Lengkap	Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur	Tanda Tangan
	Nama Pasangan Calon	.....





**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....  
Alamat : .....

Atas permintaan pemilih

Nama : .....  
Nomor Urut DPT/DPh/DPTb \*) : ..... TPS : Nomor .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., .....

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok Penyelenggara**  
**Pemungutan Suara**

**Yang Membuat Pernyataan**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.



**SURAT PENGANTAR**

**Perihal :** Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di TPS.

**Kepada**  
**Yth. Ketua PPS** .....  
**di -**  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :  
Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor ..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah  
Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.	1	Model C-KWK SATU PASLON	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
		Model C1-KWK SATU PASLON Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
		Lampiran Model C1-KWK SATU PASLON Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
	2	Model C1-KWK PLANO SATU PASLON Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	3	Model C2-KWK SATU PASLON	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	4	Model C3-KWK SATU PASLON	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5-KWK SATU PASLON	Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6-KWK SATU PASLON	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
	7	Model C7-KWK SATU PASLON	Daftar Hadir Pemilih di TPS
	8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
	9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
	10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
	11	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

**Keterangan :**

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPSS



**MODEL C5-KWK  
SATU PASLON**

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN  
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

TPS : Nomor .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota \*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

No	Nama	Saksi Pasangan Calon / PPL	Tanda tangan
1	.....	Nama Pasangan Calon	.....
3	.....	PPL/Pengawas TPS	.....

..... , .....

Yang Menyerahkan  
Ketua KPPS

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK  
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : RABU/ 27 JUNI 2018  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

....., .....

**Tata cara pemberian suara :**

- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

-Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.  
-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....
		No. DPT	: .....
		Diterima Tgl.	: .....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KWK  
SATU PASLON**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : RABU/ 27 JUNI 2018  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

....., .....

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

-Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat datang ke TPS.  
-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini* -----

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....
		No. DPT	: .....
		Diterima Tgl.	: .....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

Nomor TPS : .....  
Kelurahan/Desa\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota\*) : .....  
Provinsi : Jawa Tengah

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
JML						

\*) coret salah satu

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						
68.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
78.						
79.						
80.						
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						
101.						
102.						
103.						
104.						
105.						
106.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
107.						
108.						
109.						
110.						
111.						
112.						
113.						
114.						
115.						
116.						
117.						
118.						
119.						
120.						
121.						
122.						
123.						
124.						
125.						
126.						
127.						
128.						
129.						
130.						
131.						
132.						
133.						
134.						
135.						
136.						
137.						
138.						
139.						
140.						
141.						
142.						
143.						
144.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
145.						
146.						
147.						
148.						
149.						
150.						
151.						
152.						
153.						
154.						
155.						
156.						
157.						
158.						
159.						
160.						
161.						
162.						
163.						
164.						
165.						
166.						
167.						
168.						
169.						
170.						
171.						
172.						
173.						
174.						
175.						
176.						
177.						
178.						
179.						
180.						
181.						
182.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
183.						
184.						
185.						
186.						
187.						
188.						
189.						
190.						
191.						
192.						
193.						
194.						
195.						
196.						
197.						
198.						
199.						
200.						
201.						
202.						
203.						
204.						
205.						
206.						
207.						
208.						
209.						
210.						
211.						
212.						
213.						
214.						
215.						
216.						
217.						
218.						
219.						
220.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
221.						
222.						
223.						
224.						
225.						
226.						
227.						
228.						
229.						
230.						
231.						
232.						
233.						
234.						
235.						
236.						
237.						
238.						
239.						
240.						
241.						
242.						
243.						
244.						
245.						
246.						
247.						
248.						
249.						
250.						
251.						
252.						
253.						
254.						
255.						
256.						
257.						
258.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
259.						
260.						
261.						
262.						
263.						
264.						
265.						
266.						
267.						
268.						
269.						
270.						
271.						
272.						
273.						
274.						
275.						
276.						
277.						
278.						
279.						
280.						
281.						
282.						
283.						
284.						
285.						
286.						
287.						
288.						
289.						
290.						
291.						
292.						
293.						
294.						
295.						
296.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
297.						
298.						
299.						
300.						
301.						
302.						
303.						
304.						
305.						
306.						
307.						
308.						
309.						
310.						
311.						
312.						
313.						
314.						
315.						
316.						
317.						
318.						
319.						
320.						
321.						
322.						
323.						
324.						
325.						
326.						
327.						
328.						
329.						
330.						
331.						
332.						
333.						
334.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
335.						
336.						
337.						
338.						
339.						
340.						
341.						
342.						
343.						
344.						
345.						
346.						
347.						
348.						
349.						
350.						
351.						
352.						
353.						
354.						
355.						
356.						
357.						
358.						
359.						
360.						
361.						
362.						
363.						
364.						
365.						
366.						
367.						
368.						
369.						
370.						
371.						
372.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
373.						
374.						
375.						
376.						
377.						
378.						
379.						
380.						
381.						
382.						
383.						
384.						
385.						
386.						
387.						
388.						
389.						
390.						
391.						
392.						
393.						
394.						
395.						
396.						
397.						
398.						
399.						
400.						
401.						
402.						
403.						
404.						
405.						
406.						
407.						
408.						
409.						
410.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
411.						
412.						
413.						
414.						
415.						
416.						
417.						
418.						
419.						
420.						
421.						
422.						
423.						
424.						
425.						
426.						
427.						
428.						
429.						
430.						
431.						
432.						
433.						
434.						
435.						
436.						
437.						
438.						
439.						
440.						
441.						
442.						
443.						
444.						
445.						
446.						
447.						
448.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
449.						
450.						
451.						
452.						
453.						
454.						
455.						
456.						
457.						
458.						
459.						
460.						
461.						
462.						
463.						
464.						
465.						
466.						
467.						
468.						
469.						
470.						
471.						
472.						
473.						
474.						
475.						
476.						
477.						
478.						
479.						
480.						
481.						
482.						
483.						
484.						
485.						
486.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
487.						
488.						
489.						
490.						
491.						
492.						
493.						
494.						
495.						
496.						
497.						
498.						
499.						
500.						
501.						
502.						
503.						
504.						
505.						
506.						
507.						
508.						
509.						
510.						
511.						
512.						
513.						
514.						
515.						
516.						
517.						
518.						
519.						
520.						
521.						
522.						
523.						
524.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
525.						
526.						
527.						
528.						
529.						
530.						
531.						
532.						
533.						
534.						
535.						
536.						
537.						
538.						
539.						
540.						
541.						
542.						
543.						
544.						
545.						
546.						
547.						
548.						
549.						
550.						
551.						
552.						
553.						
554.						
555.						
556.						
557.						
558.						
559.						
560.						
561.						
562.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
563.						
564.						
565.						
566.						
567.						
568.						
569.						
570.						
571.						
572.						
573.						
574.						
575.						
576.						
577.						
578.						
579.						
580.						
581.						
582.						
583.						
584.						
585.						
586.						
587.						
588.						
589.						
590.						
591.						
592.						
593.						
594.						
595.						
596.						
597.						
598.						
599.						
600.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
601.						
602.						
603.						
604.						
605.						
606.						
607.						
608.						
609.						
610.						
611.						
612.						
613.						
614.						
615.						
616.						
617.						
618.						
619.						
620.						
621.						
622.						
623.						
624.						
625.						
626.						
627.						
628.						
629.						
630.						
631.						
632.						
633.						
634.						
635.						
636.						
637.						
638.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
639.						
640.						
641.						
642.						
643.						
644.						
645.						
646.						
647.						
648.						
649.						
650.						
651.						
652.						
653.						
654.						
655.						
656.						
657.						
658.						
659.						
660.						
661.						
662.						
663.						
664.						
665.						
666.						
667.						
668.						
669.						
670.						
671.						
672.						
673.						
674.						
675.						
676.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
677.						
678.						
679.						
680.						
681.						
682.						
683.						
684.						
685.						
686.						
687.						
688.						
689.						
690.						
691.						
692.						
693.						
694.						
695.						
696.						
697.						
698.						
699.						
700.						
701.						
702.						
703.						
704.						
705.						
706.						
707.						
708.						
709.						
710.						
711.						
712.						
713.						
714.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
715.						
716.						
717.						
718.						
719.						
720.						
721.						
722.						
723.						
724.						
725.						
726.						
727.						
728.						
729.						
730.						
731.						
732.						
733.						
734.						
735.						
736.						
737.						
738.						
739.						
740.						
741.						
742.						
743.						
744.						
745.						
746.						
747.						
748.						
749.						
750.						
751.						
752.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
753.						
754.						
755.						
756.						
757.						
758.						
759.						
760.						
761.						
762.						
763.						
764.						
765.						
766.						
767.						
768.						
769.						
770.						
771.						
772.						
773.						
774.						
775.						
776.						
777.						
778.						
779.						
780.						
781.						
782.						
783.						
784.						
785.						
786.						
787.						
788.						
789.						
790.						
JML						

No	No Urut			Jenis kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
791.						
792.						
793.						
794.						
795.						
796.						
797.						
798.						
799.						
800.						
JML						

TandaTangan  
Ketua KPPS

( ..... )

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Sri Lestari Klingsih